

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang dipakai dalam penelitian. Adapun sub bab pembahasannya meliputi a) deskripsi teori, b) penelitian terdahulu, dan c) paradigma penelitian.

A. Deskripsi Teori

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Praktik penggunaan metode pembelajaran kerap dikaitkan atau didasarkan dengan pendekatan yang diacu (Iskandar: 5).

Di sisi lain, menurut Richards (dalam Azizi, 2016: 4), metodologi terdiri dari kegiatan, tugas, dan pengalaman belajar yang digunakan pendidik dalam suatu pembelajaran. Selain itu, metodologi juga merupakan proses yang kreatif dan dinamis yang dapat mencerminkan asumsi tentang bahasa, proefisiensi, dan pembelajaran (Ghazali dalam Azizi, 2016: 4).

Metode pembelajaran mesti dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Berikut merupakan sejumlah metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh pendidik (Mulyasa, 2011: 107-116).

a. Metode Demonstrasi

Melalui metode demonstrasi, pendidik dapat memperlihatkan sebuah proses, peristiwa, atau cara kerja alat kepada peserta didik. Metode ini dapat memberi pengetahuan kepada peserta didik, selain itu juga sampai dengan cara dapat memecahkan masalah.

Metode demonstrasi juga dapat dikatakan penyajian bahan pelajaran dengan menunjukkan secara langsung objek atau cara untuk melakukan proses tertentu. Dalam praktiknya, pendidik harus mempersiapkan segala peralatan atau media yang digunakan dan memastikan peserta didik dapat melihatnya secara maksimal (Winatraputra, dalam *rangkumanpustaka.com*).

b. Metode Inquiri

Inquiri secara harfiah berarti penyelidikan. Piaget (dalam Mulyasa, 2011:108) mengungkapkan, bahwa metode ini dapat mempersiapkan peserta didik untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas supaya melihat apa yang terjadi, melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, mencari jawaban secara mandiri, serta menghubungkan dan membandingkan temuannya sendiri dengan yang lain.

c. Metode Penemuan

Metode penemuan menekankan pada pengalaman secara langsung dan mengutamakan proses daripada hasil belajar.

d. Metode Eksperimen

Metode eksperimen yakni wujud pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda, bahan, dan peralatan laboratorium. Eksperimen adalah pemecahan masalah yang di dalamnya terdapat pengujian hipotesis dan mengandung variabel-variabel yang dikontrol ketat.

e. Metode Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah mempunyai andil penting dalam pembelajaran sains dan berbagai disiplin ilmu lain, utamanya supaya pembelajaran berlangsung fleksibel.

f. Metode Karyawisata

Metode karyawisata diterapkan dengan melakukan perjalanan atau pesiar oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Terutama pengalaman langsung dan merupakan dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah.

g. Metode Perolehan Konsep

Belajar konsep merupakan hasil utama sebuah pendidikan. Konsep-konsep merupakan batu-batu pembangun (*building block*) proses berpikir sebagai dasar untuk proses mental yang lebih tinggi untuk memasukkan prinsip generalisasi-generalisasi.

h. Metode Penugasan

Metode penugasan berupa cara penyajian bahan pelajaran. Pendidik memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik individual maupun kelompok. Menurut Safi'ie,

dkk. (dalam *rangkumanpustaka.com*) penugasan (resitasi) juga dapat dikatakan metode berupa pemberian tugas kepada peserta didik yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

i. Metode Ceramah

Metode ceramah paling kerap digunakan, yakni dengan cara pendidik menyajikan bahan melalui penuturan atau penjelasan lisan secara langsung kepada peserta didik. Menyampaikan informasi, tentang konsep melalui lisan. Metode ini juga dapat dilakukan saat ingin membangkitkan motivasi, jumlah peserta didik banyak, dan saat terbatasnya media dan sumber belajar yang ada (Safi'ie, dkk. dalam *rangkumanpustaka*).

j. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan serta merangsang aktivitas dan kreativitas berpikir peserta didik. Menurut Winataputra (dalam *rangkumanpustaka.com*) penerapan metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik antara pendidik dan peserta didik secara aktif. Sebab, ketika mendapat pertanyaan peserta didik akan mencoba berpikir keras untuk menjawab. Sementara, jika ada persoalan yang tidak dipahami yang berangkat dari pertanyaan tersebut, peserta didik dapat langsung menanyakannya kepada pendidik.

k. Metode Diskusi

Diskusi dapat diartikan sebagai percakapan responsif yang dijalani dengan pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah oleh beberapa orang/peserta didik. Menurut Safi'ie, dkk. (dalam *rangkumanpustaka.com*) diskusi adalah kondisi di mana setiap peserta didik belajar untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam sebuah kelompok kecil maupun besar (dalam satu kelas). Dengan menggunakan metode ini, seluruh peserta didik berpotensi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu peserta didik dapat langsung mempraktikkan penguasaan Bahasa Indonesianya ketika berargumen di depan temannya.

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia

Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V berarti sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Seperti halnya yang dikatakan Dardjowidjojo (2003: 16) dalam bukunya, bahwa bahasa merupakan sistem simbol lisan arbitrer yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki.

Adapun fungsi dari bahasa yakni sebagai alat berkomunikasi, alat eksperisi diri, alat integrasi dan adaptasi sosial, serta alat kontrol sosial (Ahmad dan Hendri, 2015: 04). Sementara itu, fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan nasional,

lambang identitas, alat pemersatu bangsa bahasa Indonesia, dan alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah (Ahmad dan Hendri, 2015: 17-18).

Sementara itu, yang dikatakan pembelajaran adalah terjemahan dari “*intruction*”, yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran Psikologi Kognitif-holistik, yang menepatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Selain itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsi dapat mempermudah peserta didik mempelajari segala hal melalui berbagai macam media. Adapun tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku siswa, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Sanjaya, 2015: 27-28).

Menurut Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) 2016, muatan kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pendidikan tingkat dasar dan menengah meliputi beberapa poin. Di antaranya yang menjadi garis besar, yakni kepedulian, percaya diri, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan bahasa Indonesia; mengenal konteks budaya dan sosial, satuan kebahasaan, serta unsur paralinguistik dalam sajian teks; serta mengenal, dan dapat menganalisis, juga menyajikan/menyusun berbagai teks sederhana.

Akhaidah, dkk. (dalam *lenterakecil.com*) memaparkan, bahwa tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yakni agar peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain

itu, juga dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa.

Berdasar pada pernyataan di atas, dapat dikatakan, bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pendidikan formal maupun nonformal yang mengajarkan individu terkait kebahasaan Indonesia. Baik dari segi norma, budaya, sosial, komunikasi, dan umum.

Dengan ini, maka tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan pengertiannya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, yakni mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien; bangga dan menghargai Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara; memahami Bahasa Indonesia dan mengenakannya dengan kreatif, mampu menggunakan Bahasa Indonesia guna mengembangkan emosional, intelektual, dan sosial; mampu membaca dan memanfaatkan karya sastra untuk menambah wawasan (*lenterakecil.com*).

3. Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia

Berdasarkan pemaparan terkait metode pembelajaran secara umum di atas, dalam hal ini yang dimaksud metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah rencana pembelajaran bahasa. Adapun di dalamnya mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan. Selain itu, juga disiapkan segala kemungkinan pengadaan remidi dan pengembangannya (Iskandar: 5).

Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 56-66) mengklasifikasikan metode pembelajaran bahasa menjadi 16 kategori. Di antaranya, yakni metode tata bahasa/terjemahan, membaca, audio lingual, reseptif/produktif, langsung, komunikatif, integratif, tematik, kuantum, konstruktivistik, partisipatori, konstektual, pembelajaran bahasa komunitas, respons fisik total, cara diam, dan sugestopedia.

Sementara Azizi (2016:4-14), dalam penelitiannya mengaplikasikan metode pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi delapan kategori, yang pemaparannya adalah sebagai berikut.

a. Metode Tata Bahasa/terjemahan

Metode ini dilakukan dengan cara memperhatikan pembelajaran pada aspek bahasa yang statis, bukan dalam situasi penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Selain itu, metode ini juga mengembangkan keterampilan membaca dan menulis terjemah.

b. Metode Audio-lingual

Metode audio-lingual memusatkan pada urgennya pola bahasa dalam pembelajaran dan berasumsi bahwa bahasa lisan merupakan alat komunikasi yang utama. Metode ini didasarkan pada bidang psikologis behaviorial, yang menekankan metode menghafal dan mengulang kalimat (*drill*).

c. Metode SAS (Struktur Analitik Sintetik)

Menurut Saliwangi (dalam Azizi, 2016:8), metode ini didasarkan pada ilmu jiwa totalitas oleh Gestalt, yang berasumsi

bahwa segala kesadaran dan pengindraan sebagai satu keseluruhan. Maka, peserta didik diperkenalkan struktur totalitas terlebih dahulu, kemudian mengamati secara berkelanjutan hingga pada satuan bahasa terkecil, yakni huruf.

d. Metode Linguistik

Metode ini sering disebut juga dengan oral-aural, yang kerap dipakai guna mempelajari bahasa asing. Pelajaran dan bahan ajar yang disampaikan berdasarkan analisis deskriptif bahasa yang diajarkan dan bahasa ibu peserta didik.

e. Metode Langsung

Praktik metode langsung dalam pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa yang diajarkan. Menggunakan pengantar bahasa Indonesia keseluruhan tanpa selingan bahasa ibu di daerah manapun. Penerapan metode ini membutuhkan latihan menyimak dan meniru secara intensif hingga bentuk bahasa benar-benar dikuasai peserta didik.

f. Metode Pembatasan Bahasa

Metode ini memusatkan perlunya pembatasan dan penggradasian struktur dan kosakata bahasa yang diajarkan. Kata-kata yang sering digunakan dalam keseharianlah yang diambil sebagai sumber dan latihan penggunaan bahasa (Upadana dalam Azizi, 2016: 13).

g. Metode Membaca

Metode membaca ini menekankan untuk melatih keterampilan peserta didik dalam hal membaca dan memiliki kemampuan dalam memahami bacaan yang diperlukan dalam pembelajaran.

h. Metode Bibahasa

Metode bahasa didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara bahasa pertama, bahasa ibu, dan bahasa yang diajarkan. Perbandingan itu dilihat mulai dari kosa kata, bunyi, bentuk, dan sintaksis bahasa tersebut. Prasetyo (dalam Azizi, 2016: 14) menjelaskan, bahwa metode ini mirip dengan metode linguistik, yang menggunakan bahasa ibu untuk memperkuat penjelasan pendidik kepada peserta didik.

Dengan jumlah kategori yang sama, rujukan lain memberikan metode pembelajaran Bahasa Indonesia yang cukup berbeda, akan tetapi lebih familier dipakai pembelajaran pada umumnya. Mirip sebagaimana metode pembelajaran oleh Mulyasa (2011) pada pembahasan sebelumnya (poin 1). Adapun kesemuanya yakni meliputi a) metode ceramah, b) metode diskusi, c) metode resitasi (penugasan), d) metode tanya jawab, e) metode simulasi, f) metode demonstrasi, g) metode inquiri, dan h) metode karya wisata (*rangkumanpustaka.com*).

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusi

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak Berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki kekhususan dan memerlukan pendidikan khusus pula, supaya bakat minatnya dapat dikembangkan. Istilah lain dari ABK adalah “Anak Luar Biasa”, yang menandakan adanya kelainan khusus.

ABK memerlukan suatu metode pembelajaran yang bersifat khusus. Pola yang bervariasi diharapkan dapat meningkatkan potensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baik untuk mendukung perkembangan nalar, fisik, maupun sosialisasinya.

Berkenaan dengan ini, Smart (2012: 33) berpendapat, bahwa yang dikatakan ABK adalah anak dengan karakteristik khusus dan berbeda dengan anak lain pada umumnya. Sementara menurut Saji (2018: 39), pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Inklusif Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur, ABK adalah istilah lain dari difabel dalam dunia pendidikan. Anak yang membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus, baik dari orang tua maupun pendidik, terutama dalam hal yang dibutuhkan. Seperti halnya keterbatasan, kelebihan, kekurangan, bakat, minat dan potensinya.

Saji (2018: 61) juga memaparkan, bahwa difabel (ABK) merupakan kondisi hambatan pada pendengaran, penglihatan fisik, kecerdasan, syaraf atau campuran dari beberapa hambatan tersebut.

Hal ini, dapat berdampak pada perkembangan fisik, emosi, dan sosial.

Difabel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, diartikan sebagai penyandang cacat. Sementara disabilitas adalah keadaan semacam sakit/cidera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.

Oleh karena itu, ABK merupakan anak yang mempunyai karakteristik berbeda lahir dan batin. Baik dalam hal fisik, kesehatan, kemampuan mengindra, berpikir, beradaptasi, emosi dan sosial. Hal ini berpengaruh pada kebutuhan yang bersifat khusus dalam bidang pendidikan.

b. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Adapun jenis-jenis atau kategori ABK termaktub dalam Permendiknas Republik Indonesia No. 70 Thn. 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 3. Peserta didik yang memiliki kelainan, sebagai mana dimaksud, meliputi 13 macam, yakni tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya; dan tunaganda.

Sedikit berbeda dengan Permendiknas di atas, dari 13 kategori tersebut, pada Pergub Jatim No. 6 Thn. 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Proinsi Jawa Timur Bab III, Pasal 11 Ayat (2), peserta didik berkebutuhan khusus memiliki tambahan satu kategori lagi, yakni kategori ke-14, cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

1) Tunanetra

Dalam dunia pendidikan khusus, gangguan penglihatan diartikan sebagai hambatan menerima informasi menggunakan indra penglihatan, yang sering disebut juga tunanetra. Seseorang dikatakan mengalami gangguan penglihatan, jika visusnya kurang dari 6/21. Hal ini berarti, berdasarkan tes, orang tersebut hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, yang semestinya mampu dibaca pada jarak 21 meter oleh orang awas (Somantri, 2012: 65-66).

Gangguan penglihatan dibedakan menjadi dua, yakni buta dan setengah melihat atau rabun (*low vision*). Buta adalah ketika tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar sama sekali (visus 0). Sementara *low vision*, adalah ketika seorang masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya tidak lebih dari 6/21 (Somantri, 2012: 66).

Di sisi lain, Smart (2012: 36) mengklasifikasikan tunanetra ke dalam tiga jenis. Adapun ketiganya meliputi *myopia*, *hyperopia*, dan *astigmatisme*. *Myopia* berarti penglihatan jarak dekat (rabun jauh). *Hyperopia* berarti penglihatan jarak jauh (rabun dekat). Sementara *astigmatisme*

berarti penglihatan kabur atau penyimpangan sebab permasalahan pada kornea mata atau permukaan lain, pada kornea mata, hingga bayangan benda tidak fokus pada retina.

2) Tunarungu

Somantri, dalam bukunya (2012: 93) mengungkapkan, bahwa tunarungu dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan bahkan kehilangan dalam hal pendengaran. Hal tersebut menyebabkan seorang tidak dapat merangsang suara melalui indra pendengaran.

Di samping itu, Dwidjosumarto (dalam Somantri, 2012: 93) memaparkan, bahwa tunarungu terbagi menjadi dua, yakni tuli (*deaf*), dan kurang dengar (*low of hearing*). Seorang dikatakan tuli ketika pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat. Sementara seorang dengan kekurangan dalam hal pendengaran adalah ketika mengalami kerusakan, akan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar.

Gangguan pendengaran atau tunarungu ini, juga dapat memengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Mereka dimungkinkan mengalami kesulitan berbicara, mengingat kemampuan berbicara juga dipengaruhi seberapa seringnya mendengarkan percakapan (Smart, 2012: 34).

3) Tunawicara

Tunawicara adalah istilah yang digunakan bagi penyandang yang mengalami gangguan bicara. Penyandang kelainan ini juga dapat memperoleh pendidikan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kemendikbud, 2016: 38).

Di samping itu, menurut Religiana (2016: 25), tunawicara yakni mereka yang mengalami kesulitan bicara, sebab kurang/tidak berfungsinya lagi alat-alat bicara, bisa juga indera pendengaran, kerusakan saraf/struktur otot, ataupun keterlambatan perkembangan bahasa.

4) Tunagrahita

Tunagrahita adalah istilah bagi penyandang intelektual di bawah rata-rata atau retardasi mental. Ketunaan ini dapat ditandai dengan terbatasnya inteligensi kecakapan interaksi. Berdasarkan ukuran kecerdasan inteligensi menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita tergolong menjadi empat klasifikasi sebagai berikut (Smart, 2012: 49-52).

- a) Ringan (*Moron/Debil*), memiliki IQ 50 – 55 sampai 70.
- b) Sedang (*Imbesil*), biasanya memiliki IQ 35 – 40 sampai 50 – 55.
- c) Berat (*Severe*), memiliki IQ 20 – 25 sampai 35 – 45.
- d) Sangat berat (*Profound*), menurut skala Binet IQ di bawah 19, sedangkan tes WISC di bawah 24.

Menurut Smart (2012: 63), *down syndrome* merupakan salah satu bagian dari tungrahita, yakni kelainan terbentuknya kromosom 21. Kelainan ini terjadi sebab kegagalan sepasang kromosom saling memisahkan diri saat proses pembelahan. Seorang dengan penyandang sakit ini juga disebut dengan mongoloid, sebab tampak nyata dilihat dari segi fisiknya yang memiliki hidung datar menyerupai orang mongolia. Selain *down syndrome* juga memiliki tubuh relatif pendek dan kepala yang terkesan lebih kecil.

5) Tunadaksa

Tunadaksa merupakan konotasi bagi penyandang kelainan fisik, seperti halnya pada tangan, kaki atau bentuk tubuh. Maka ada yang menyebut istilah lain dari tunadaksa adalah tunafisik. Segala jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan gejala penyerta yang menghambat aktivitas (Smart, 2012: 44).

Di samping itu, menurut Djaja Rahaja (dalam Smart, 2012: 45), tunadaksa dibedakan menjadi dua golongan, yakni murni dan kombinasi. Tunadaksa murni yakni penyandang yang mengalami gangguan mental atau kecerdasan, *poliomyelitis* serta cacat *ortopedis* lainnya. Sementara penyandang tunadaksa kombinasi masih ada yang normal, akan tetapi dominan mengalami gangguan mental.

Di sisi lain, ada lagi yang mengklasifikasikan tunadaksa menjadi tiga golongan. Di antaranya, yakni 1) tunadaksa ringan, yang meliputi tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan (sedikit gangguan mental dan kecerdasan cenderung normal). 2) tunadaksa taraf sedang, yakni akibat cacat bawaan, tunamental ringan, dan polio ringan. 3) tunadaksa taraf berat, yakni akibat tunamental berat, sebab infeksi (Smart, 2012: 45-46).

6) Tunalaras

Tunalaras merupakan sebutan bagi penyandang hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya menunjukkan perilaku menyimpang dan tidak selaras dengan norma umum (Smart, 2012: 53).

Tunalaras diklasifikasikan menjadi dua kategori besar. Berikut ini adalah pengembangannya menurut William M. C. (dalam Smart, 2012: 53-54).

- a) Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, meliputi *the semi-socialize child* (terbatas pada lingkungan tertentu), *children arrested at a primitive level of socialization* (sosial tingkat rendah), dan *children with minimum socialization capacity* (tidak mempunyai kemampuan sosial).

b) Gangguan emosi, meliputi *neurotic behavior* (mempunyai masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan) dan *children with psychotic processes* (tidak memiliki kesadaran diri).

7) Berkesulitan Belajar

Kesulitan belajar didefinisikan sebagai gangguan reseptual, konseptual, memori ataupun ekspresif dalam proses belajar. Anak dengan kategori ini memiliki fungsi mental dan fisik yang tidak teratur. Hal ini dapat menghambat alur belajar normal dan menyebabkan keterlambatan dalam kemampuan reseptual-motorik atau bahasa (Somantri, 2012: 195).

8) Lamban Belajar

Lamban belajar yakni sebutan bagi seseorang/anak yang memiliki intelektual di bawah rata-rata normal. Sebab itu, mengakibatkan terhambat/lambatnya berpikir, bersosial, merespon, dan merangsang (Religiana, 2016: 26).

9) Autis

Autisme merupakan keadaan seseorang yang dibawa sejak lahir atau masa balita. Hal ini menyebabkan seorang tersebut tidak dapat berkomunikasi di lingkungan sosial secara normal. Secara neurologis (sistem pernafasan), autis diartikan sebagai gangguan perkembangan otak, terutama pada bagian sosial, bahasa, dan fantasi (Smart, 2012: 56). Di sisi lain, autistik menurut Yuwono (2012: 24) adalah gangguan

perkembangan yang memengaruhi aspek anak dalam hal melihat dunia dan belajar melalui pengalamannya.

Sementara itu, menurut Maulana (2012: 11), autisme dapat terjadi pada 5 dari setiap 10.000 kelahiran, yang mana jumlah penderita laki-laki empat kali lebih besar dibandingkan dengan penderita perempuan. Namun, diasumsikan jika penderita perempuan lebih parah dibandingkan dengan laki-laki.

Smart (2012: 61) juga merumuskan, bahwa potensi autisme salah satunya adalah dipicu oleh makanan. Tepatnya pada penelitian yang mencurigai makanan modern mengandung zat kimia dan menyebabkan kasus *Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder* (ADHD) meningkat.

10) Gangguan Motorik

Kesulitan dalam hal mengendarai sepeda, mengancingkan baju, ataupun menggunakan gunting adalah contoh anak mengalami gangguan perkembangan kordinasi motorik (*development coordination disorder/DCD*) (*kompas.com*, 2010). Menurut artikel *alodokter* yang ditinjau Dr. Marianti (2017), penyakit saraf motorik merupakan gangguan saraf yang mengakibatkan hilangnya kekuatan otot secara bertahap.

Anak DCD biasanya juga mengalami gangguan konsentrasi dan keterlambatan bicara. Anak dengan fungsi

koordinasi yang buruk akan berdampak pada kemampuan aktivitas fisik dan dalam jangka waktu lama memengaruhi berat badannya (Dr. Jhon Cairney, dalam *kompas.com*, 2010).

11) Korban Penyalahgunaan Narkoba, Obat Terlarang, dan Zat Adiktif

Selain kelainan fisik dan mental, anak korban penyalahgunaan narkoba juga tergolong ke dalam kategori ABK yang dapat menempuh pendidikan inklusif. Namun, dimungkinkan jumlahnya lebih sedikit di banding kategori yang lain (Kemendikbud, 2016: 53).

12) Kelainan Lain

Penyandang kelainan lain yang dimaksud di sini adalah kelainan selain dari ketiga belas kategori lainnya. Pada referensi lain, terdapat beberapa perbedaan istilah atau ABK lain yang juga memerlukan pendidikan khusus atau isnklusif.

13) Tunaganda

Penyandang tunaganda adalah seorang/anak yang memiliki kelainan lebih dari satu jenis (Religiana, 2016: 26). Sementara menurut buku yang disusun oleh Kemendikbud (2016: 65), tunaganda yaitu penyandang kombinasi kelainan, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan serius. Maka, perlu diatasi dan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki.

14) Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa

Keberbakatan terbentuk dari hasil interaksi tiga kluster penting, menurut Renzulli (dalam Somantri, 2012: 162), yakni meliputi kemampuan di atas rata-rata, komitmen tinggi terhadap tugas, dan kreativitas. Hal ini merupakan paduan dari kecakapan intelektual, prestasi akademik, kreativitas dan bakat, serta aspek sosial.

c. Pendidikan Inklusif

Kelas Inklusif adalah kelas reguler yang terdapat ABK di dalamnya untuk keperluan belajar bersama. Sementara menurut Pergub Jatim No. 6 Thn. 2011 Bab 1 Ayat 14, lingkup yang lebih tinggi adalah pendidikan inklusif, yakni sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan dari pendidikan Inklusif itu sendiri dengan Pergub yang sama pada Bab II Pasal 2, adalah a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Adapun pengertian dan tujuan pendidikan inklusif yang dirujuk dari Pergub di atas, sama dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 1 dan 2.

Selain pengertian dan tujuan pendidikan iklusif, hal ihwal lainnya juga termaktub dalam Permendiknas dan Pergub yang sama. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.

a) Permendiknas Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009

Berikut tujuh pasal lain yang terkait dengan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 4 menerangkan, bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima ABK. Sementara itu, satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota, juga dapat menerima ABK. Di sisi lain, dalam hal ini Pergub Jatim No. 6 Thn. 2011 Bab III menetapkan penunjukan dilakukan mulai dari tingkat PAUD.

Pasal 5 menjelaskan, bahwa penerimaan ABK pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

mengalokasikan kursi ABK paling sedikit satu peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima. Namun, jika dalam waktu yang ditetapkan, alokasi ABK tidak terpenuhi, sekolah dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6 meliputi keterangan, bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Selain itu, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Pasal 8 menjabarkan, bahwa pembelajaran pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang akan digunakan. Adapun penerapannya, menyesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 9 meliputi beberapa butir, yakni penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Sebaliknya, peserta didik yang mengikuti pembelajaran di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

bersangkutan. Dengan ini, peserta didik yang mendapat surat tamat belajar dapat melakukan studi lanjut pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif/khusus.

Pasal 10 mengandung pernyataan, bahwa untuk mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Di sisi lain, satuan pendidikan yang tidak ditunjuk juga wajib menyediakan paling sedikit satu GPK. Pemerintah juga wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, pemerintah provinsi juga terlibat dalam membantu menyediakan tenaga pembimbing khusus dan meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan inklusif tersebut.

Pasal 11 memaparkan, bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan tersebut. Bantuan yang ada dapat disalurkan melalui kelompok kerja

pendidikan inklusif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Pergub Jatim No. 6 Thn. 2011

Berikut dua bab dan pasal lain yang terkait dengan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Bab IV Pasal 15 memaparkan, bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan/atau Swasta. Sementara untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK Negeri dan/atau Swasta, dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

BAB V Pasal 17 menjelaskan, bahwa biaya pelaksanaan peraturan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kelas VII di Sekolah Inklusi SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII di Sekolah Inklusi SMP Taman Dewasa

Ibu Pawiyatan, hambatan proses pembelajaran, dan juga upaya pendidik mengatasi hambatan tersebut. Pelaksanaan pembelajaran diteliti berdasarkan komponen pembelajaran berupa tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media dan evaluasi (Ramadhani: 1011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pendidik Bahasa Indonesia dan peserta didik kelas VII SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan. Objek penelitian difokuskan pada pembelajaran Bahasa Indonesia, hambatan, dan upaya pendidik dalam mengatasi hambatan pada saat pembelajaran berlangsung. Data diperoleh melalui pengamatan partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Adapun teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sementara keabsahan data diperoleh melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi (Ramadhani: 1011).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pertama, pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII di Sekolah Inklusi SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan direncanakan melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan disesuaikan dengan komponen pembelajaran RPP tersebut. Umumnya, komponen pembelajaran untuk siswa/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan siswa regular dibuat sama dengan ABK lebih mendapat perhatian khusus. Media pembelajaran yang digunakan meliputi media visual

berupa LCD proyektor, media audio berupa pengeras suara, dan media cetak berupa buku ajar (Ramadhani: 1011).

Kedua, hambatan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah peserta reguler tidak berkenan berbaur dengan ABK saat pembelajaran. Selain itu, kurangnya minat ABK guna mengikuti pembelajaran juga turut menghambat. Sementara, ketiga, guru memiliki solusi mengatasi hambatan dengan memberikan perhatian khusus kepada ABK serta berkonsultasi kepada Guru Pembimbing Khusus (GPK). (Ramadhani:1011).

2. Metode *Lessons Study* dalam Proses Komunikasi Guru dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif Kualitatif Metode *Lessons Study* dalam Proses Komunikasi Guru dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Inklusi) di SMPN 39 Surabaya)

Lessons Study merupakan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik atau tim dengan merujuk pada metode pembelajaran, alat peraga, materi, pendidik *observer*, beserta evaluasinya berdasar kebutuhan dan karakter peserta didik. Pada penelitian ini tepatnya diterapkan dalam mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK/Inklusi) (Permana, 2014: xi).

Landasan teori yang dikenakan yakni pertukaran sosial berdasarkan pada seorang pendidik yang harus merencanakan, melaksanakan dan merefleksi dalam pembelajaran *lessons study*. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan observasi dan wawancara mendalam (Permana, 2014:xi).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *lessons study* yang digunakan pendidik dengan model komunikasi meliputi beberapa tahap. Di antaranya, yakni merencanakan bersama tim untuk menyesuaikan materi dengan ragam ketunaan yang dimiliki ABK (Permana, 2014: xi).

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kelas Inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan cara guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Ekakapti Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi cara guru mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, kesulitan guru dalam pembelajaran, dan upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Ekakapti Karangmojo dan objek penelitian ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kelas inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen dan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Keabsahan data hasil penelitian menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) persiapan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kelas inklusif dilakukan dengan menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dimodifikasi; (2) pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan materi dan situasi kelas; (3) penilaian pembelajaran lebih banyak dilakukan dalam bentuk tes tertulis; (4) kesulitan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah menyusun program pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya soal-soal tertulis dalam jumlah banyak; dan (5) upaya guru untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kelas VII di Sekolah Inklusi SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan	Pembelajaran Bahasa Indonesia (PBI), singkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pendidikan inklusi	PBI secara keseluruhan, tidak fokus pada metodenya dan hanya fokus pada kelas VII saja	1) Pelaksanaan PBI kelas VII di Sekolah Inklusi SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan direncanakan melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Umumnya, komponen pembelajaran ABK dengan regular sama. Sementara media yang digunakan meliputi proyektor, pengeras suara, dan buku ajar. 2) Hambatan dalam PBI yakni peserta reguler tidak berkenan berbaur dengan ABK saat pembelajaran dan kurangnya minat ABK dalam mengikuti pembelajaran. 3) Pendidik mengatasi hambatan dengan memberikan perhatian khusus kepada ABK serta berkonsultasi kepada Guru Pembimbing Khusus (GPK).

2.	Metode <i>Lessons Study</i> dalam Proses Komunikasi Guru dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif Kualitatif Metode <i>Lessons Study</i> dalam Proses Komunikasi Guru dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Inklusi) di SMPN 39 Surabaya)	Metode Pembelajaran, Pembelajaran ABK di kelas inklusi, dan singkat SMP	Metode pembelajaran <i>Lesson Study</i> , khusus proses komunikasi pendidik dengan ABK	<i>Lessons study</i> yang digunakan pendidik dengan model komunikasi meliputi beberapa tahap. Di antaranya, yakni merencanakan bersama tim untuk menyesuaikan materi dengan ragam ketunaan yang dimiliki ABK
3.	Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kelas Inklusif di SMP Ekakapti Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul	PBI dalam kelas inklusi dan seingkat SMP	PBI secara keseluruhan, tidak fokus pada metodenya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan PBI di kelas inklusif dilakukan dengan menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP yang dimodifikasi 2) Pelaksanaan PBI menerapkan metode yang disesuaikan dengan materi dan situasi kelas 3) Penilaian pembelajaran banyak dilakukan dalam bentuk tes tertulis 4) Kesulitan pendidik dalam PBI adalah menyusun program PBI, khususnya soal tertulis dalam jumlah banyak. 5) Upaya mengatasi kesulitan dalam PBI adalah menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi.

C. Paradigma Penelitian

Berdasarkan penyajian kajian teori, dapat disusun suatu paradigma penelitian untuk memperjelas maksud dan arahahan penelitian. Paradigma

penelitian ini disusun berdasarkan fokus yang dipakai dalam penelitian, yakni metode pembelajaran Bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kelangsungan belajar mengajar ABK di dalam kelas inklusif.

Kesuksesan suatu pembelajaran dapat ditunjukkan dengan kemampuan nyata dari hasil belajar yang lebih baik dan meningkat dari peserta didik. Maka dari itu, dibutuhkan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter merata peserta didik. Adapun pada praktiknya, setiap pendidik perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung model pembelajaran yang digunakan, di antaranya metode dan strategi pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Namun, praktik dalam pendidikan inklusi menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai pihak sekolah yang terlibat. Perlu adanya kerja sama yang lebih serius antara pendidik, wali kelas, GPK, waka kurikulum, kepala sekolah dan pemerintah. Mengingat pendidikan ABK yang umumnya dapat dididik melalui institusi khusus tersendiri, kini dikombinasi dengan sekolah reguler.

Bagan 1. Paradigma Pemikiran